

## POLEMIK KENAIKAN PAJAK HIBURAN

# Pemkot Pilih Batas Terendah, Target Tak Bertambah

**YOGYA (KR)** - Menindaklanjuti amanat undang-undang terkait kenaikan pajak hiburan, Pemkot Yogya juga sudah melakukan penyesuaian. Akan tetapi Pemkot lebih memilih batas kenaikan yang terendah serta target perolehannya pun tidak bertambah.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, mengaku kenaikan pajak hiburan sejatinya menjadi kesempatan bagi daerah yang bertumpu pada industri pariwisata. Namun demikian pihaknya juga perlu mendengarkan aspirasi dari para pelaku industri tersebut. "Hari ini (kemarin) kabupaten dan kota juga diundang untuk berkoordinasi terkait hal itu. Kemarin Pak Luhut selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga sudah mengatakan untuk rencana penundaan," jelasnya, Kamis (18/1).

Kenaikan pajak hiburan tersebut merupakan salah satu dampak dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Khusus pajak hiburan petunjuk teknisnya juga sudah diterbitkan dan mulai berlaku per 1 Januari 2024. Jenis usaha hiburan yang terdampak ialah karaoke, spa dan hiburan malam. Batas kenaikannya sudah ditentukan antara 40 persen hingga 75 persen.

Singgih menilai, meski ada peluang untuk mendongkrak pendapatan asli daerah dari sektor pajak namun harus tetap dipikirkan secara matang. Terutama menyangkut daya beli ma-

syarakat hingga dampaknya di sektor usaha pariwisata secara umum. "Jadi ini harus kita pertimbangkan betul. Namun kami juga harus menjalankan amanah undang-undang sembari nanti ada kebijakan terbaru dari pusat," imbuhnya.

Kepala Bidang Pembukaan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya RM Kisbiyantoro, memaparkan dalam APBD 2024 kenaikan pajak hiburan juga sudah disesuaikan. Dari tiga jenis usaha hiburan, hanya ada dua yang menjadi wajib pajak daerah di Kota Yogya yakni usaha karaoke dan spa. Batas kenaikan yang diambil juga yang paling rendah yakni 40 persen. Sebelumnya pajak hiburan untuk usaha karaoke diterapkan 30 persen, dan pajak usaha spa 20 persen. Kedua pajak daerah tersebut per 1 Januari 2024 lalu sudah dipungut pajak sebesar 40 persen. "Jumlah wajib pajak karaoke hanya ada empat, sedangkan yang cukup banyak ialah spa. Usaha spa ini yang mungkin sangat terasa karena naiknya dua kali lipat dari tahun lalu," urainya.

Meski ada kenaikan pajak namun target yang sudah menjadi kesepa-

katan bersama dengan lembaga dewan justru tidak ditambah. Target pajak hiburan sepanjang tahun ini sama dengan tahun lalu yakni Rp 10 miliar. Pada tahun 2023, realisasi pajak hiburan mencapai 111 persen atau Rp 11,6 miliar.

Di samping itu, kenaikan pajak hiburan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Total ada 10 jenis pajak daerah yang dipungut Pemkot Yogya. Pendapatan primadona masih diduduki oleh pajak hotel, disusul pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak restoran, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta pajak perancangan jalan. Pajak hiburan justru berada di urutan ke tujuh dari 10 pajak daerah. "Dari sisi realisasi memang tidak berdampak signifikan dengan adanya kenaikan pajak hiburan. Tetapi memang perlu dilihat bagaimana dampaknya di sektor lain. Ketika misal nanti pemerintah pusat menunda kenaikan pajak hiburan, kami juga akan langsung menyesuaikan," terangnya.

Secara umum, realisasi pajak daerah tahun 2023 lalu tercapai 118 persen dari target. Yakni sebesar Rp 550,5 miliar sedangkan targetnya Rp 467 miliar. Realisasi terbanyak ialah pajak hotel sebesar Rp 203,3 miliar disusul PBB Rp 111,7 miliar dan pajak restoran Rp 85,5 miliar. Sementara pajak hiburan tahun lalu realisasinya Rp 11,6 miliar. Sedangkan untuk tahun 2024, target pajak daerah ditetapkan sebesar Rp 532 miliar. (Dhi)-f

## UKW PWI-BUMN DIKUTI 29 PESERTA

# Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Wartawan



KR-Devid Permama

### Pembukaan UKW kolaborasi PWI-BUMN di Yogyakarta.

**YOGYA (KR)** - Tiga BUMN bersama Forum Humas BUMN mendukung penuh penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang dilaksanakan oleh PWI DIY di Hotel Forriz, Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta, 18-19 Januari 2024. Ketika BUMN tersebut yaitu PT BRI (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

UKW kolaborasi PWI dengan BUMN (PWI Bersama BUMN) ini mengangkat tema 'Menciptakan Wartawan Profesional dan Berakhlak'. UKW diikuti 29 peserta/wartawan di DIY yang telah memenuhi syarat administrasi dan terverifikasi, terdiri 18 wartawan jenjang kompetensi Muda, 6 wartawan jenjang Madya dan 5 wartawan jenjang Utama dengan pengujian-pengujian kompetensi.

UKW dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kota Yogyakarta Tri Hastono mewakili Pejabat Walikota Yogyakarta. Hadir dalam acara pembukaan antara lain Direktur UKW PWI Pusat Firdaus Komar mewakili Ketua PWI Pusat, Muji Prasetyo Widodo (Regional Operation Head BRI RO Yogyakarta), Muhammad Shofa (Manager SDM PT PNM Cabang Yogyakarta), Hendras Andri Pratama (Humas PT KAI Yogyakarta) dan Ketua PWI DIY Hudono SH.

Firdaus Komar menuturkan, PWI Pusat bekerja sama dengan Kementerian BUMN mengadakan program UKW bertajuk 'PWI Bersama BUMN' yang digelar di seluruh provinsi di Indonesia.

"Seluruh kegiatan UKW PWI Bersama BUMN ini didukung penuh dan dibiayai oleh BUMN. Kita (PWI) berterima kasih kepada BUMN. Ini menunjukkan bahwa ada kepedulian dari BUMN terhadap pe-

ingkatan kualitas dan profesionalisme para wartawan di seluruh Indonesia," ujarnya saat acara pembukaan UKW, Kamis (18/1).

Tri Hastono mengatakan, relasi Pemerintah Kota Yogyakarta dengan teman-teman wartawan/media selama ini adalah relasi yang sangat sehat, karena semua wartawannya sudah berkompeten dan tersertifikasi, sehingga tidak ada wartawan abal-abal. "Kami berharap peningkatan kompetensi dan profesionalisme wartawan melalui UKW PWI Bersama BUMN ini akan meningkatkan kerja sama yang saling ungkit antara Pemkot Yogya dan media," katanya.

Hudono menuturkan, penyelenggaraan UKW kolaborasi PWI-BUMN ini menunjukkan bahwa keberadaan wartawan profesional yang mampu menyajikan berita/informasi akurat, tidak hoaks dan dapat dipertanggungjawabkan, betul-betul dibutuhkan oleh semua pihak termasuk BUMN/swasta. Pasalnya, masih ada pemahaman yang kurang tepat yang menganggap manfaat UKW hanya untuk wartawannya saja. Padahal para pengguna (user) termasuk para narasumber juga akan mendapatkan manfaat dari wartawan yang berkualitas dan profesional.

"UKW kolaborasi PWI-BUMN ini bisa menjadi percontohan. Lembaga-lembaga lain selain BUMN bisa juga berkolaborasi dengan PWI. Bentuk kolaborasi tidak harus UKW, bisa berbentuk Sekolah Jurnalisisme atau pelatihan lainnya," terang Hudono.

Sedangkan Muji Prasetyo Widodo mengatakan, peran insan pers dan media sangat dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat. Oleh karena itu, insan pers dituntut terus kreatif dan profesional dalam menyajikan berita dengan tetap berpegang teguh pada etika jurnalistik. (Dev)-f

## GANDENG 21 LEMBAGA DAN ORGANISASI

# Layanan Bantuan Hukum Gratis Kembali Digulirkan

**YOGYA (KR)** - Program pemberian layanan bantuan hukum secara gratis yang diberikan oleh Pemkot Yogya kembali digulirkan untuk tahun ini. Total ada 21 lembaga atau organisasi bantuan hukum yang berhasil digandeng untuk memberikan layanan sepanjang tahun ini. Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Kota Yogya Saverius Vanny Noviandri, mengungkapkan bantuan hukum gratis itu khusus bagi masyarakat kategori miskin. "Layanan ini merupakan bentuk kepedulian Pemkot Yogya terkait pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum," tandasnya, Kamis (18/1).

Sepanjang tahun 2023 lalu terdapat 22 lembaga atau organisasi bantuan hukum yang menjadi mitra Pemkot. Sedangkan tahun ini hanya 21 lembaga dan organisasi bantuan hukum yang melan-

jutkan program tersebut. Meski berkurang satu lembaga namun tidak akan mengurangi kualitas layanan yang diberikan.

Vanny menyebut pada tahun lalu total ada 55 perkara yang ditangani melalui layanan bantuan hukum gratis tersebut. Mayoritas ialah perkara hukum litigasi atau perkara yang diselesaikan melalui persidangan baik pidana, perdata maupun tata usaha negara. "Untuk non litigasi seperti bantuan di luar peradilan tapi tidak melulu soal perkara misalnya penyuluhan hukum, konsultasi hukum, bisa juga mediasi, atau negosiasi dan juga drafting dokumen hukum juga diberikan. Namun untuk jumlah kasus yang masuk bisa dikatakan perdata yang lebih dominan," imbuhnya.

Kendati demikian, tidak semua perkara hukum bisa mendapatkan layanan bantuan secara gratis. Terutama bagi tindak pidana makar,

kekerasan seksual, psikotropika dan zat adiktif atau narkoba, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Sementara untuk mendapatkan layanan tersebut pihak yang berperkara harus masuk kategori keluarga tidak mampu. Terutama masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS), kartu Indonesia pintar, kartu perlindungan sosial atau kartu keluarga sejahtera, atau kartu jaminan kesehatan khusus. Selain itu juga bisa menggunakan surat keterangan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum dan harus diketahui oleh pejabat penegak hukum.

"Bisa langsung menghubungi lembaga atau organisasi bantuan hukum maupun datang ke Bagian Hukum Setda Kota Yogya," tandasnya.

Dirinya menambahkan, Pemkot Yogya sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 250 juta untuk program bantuan hukum gratis. Akan tetapi pada tahun 2023 lalu anggaran tersebut hanya terserap 50 persen dari total keseluruhan. (Dhi)-f

## FASILITASI ODGJ GUNAKAN HAK PILIH

# Dinas Siapkan Pendamping Khusus

**YOGYA (KR)** - Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tetap bisa menggunakan hak pilih dalam Pemilu, 14 Februari mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Sosial (Dinsos) DIY sudah menyiapkan pendamping khusus bagi ODGJ saat mereka menggunakan hak pilihnya.

Pendamping khusus tersebut diperuntukkan bagi ODGJ yang tengah menjalani rehabilitasi di panti pemerintah maupun swasta.

"Saat ini tercatat ada sekitar 350 ODGJ di balai-balai atau panti rehabilitasi dan penampungan milik Pemda DIY. Dinsos DIY akan segera berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY untuk menyiapkan tempat pemungutan suara (TPS) terdekat bagi ODGJ. Termasuk, sosialisasi cara pencoblosoan sebelum masuk bilik suara," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY Endang Patmintarsih di Yogyakarta, Kamis (18/1).

Endang Patmintarsih, meski memiliki keterbatasan dan membu-

tuhkan perlakuan khusus, ODGJ tidak boleh kehilangan hak politiknya.

Untuk itu pihaknya dengan dukungan sejumlah pihak sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk memfasilitasi hal tersebut. Dimana nantinya ODGJ akan mendapatkan perlakuan khusus agar bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu

2024 14 Februari mendatang.

"Dalam Pemilu mendatang, penanganan atau pelayanan lebih kami fokuskan di panti tentunya baik panti pemerintah maupun panti swasta. Jadi pendamping di setiap panti akan ada pendampingan semua orangtua atau keluarga pengganti," terangnya. (Ria)-f

## CATATKAN KINERJA CEMERLANG DI 2023 BRI Raih Lebih 200 Penghargaan, 53 Diantaranya Bertaraf Internasional



Beberapa Penghargaan yang diraih BRI

KR-Istimewa

**JAKARTA (KR)** - Keberhasilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam mencatatkan kinerja yang gemilang secara berkelanjutan, tak hentinya mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Mulai dari penghargaan, pengakuan hingga peringkat dari lembaga bergengsi dan kredibel, baik tingkat nasional maupun internasional.

Seperti diketahui, di usianya yang mencapai 128 tahun, sepanjang tahun 2023 lalu setidaknya lebih 200 penghargaan disematkan kepada BRI. Dari jumlah tersebut, 53 di antaranya merupakan penghargaan bertaraf internasional. Adapun beberapa penghargaan dan pencapaian tersebut adalah Forbes Global 2000 menobatkan BRI sebagai World Largest Company In Indonesia, peringkat 1 di Indonesia dan peringkat 307 di dunia, naik dari peringkat 349 tahun lalu.

Euromoney menobatkan BRI sebagai Market Leader in Indonesia dan Best Service di Asia Pacific. Asia Money menobatkan BRI sebagai Best Domestic Bank in Indonesia, Best Domestic Private Bank in Indonesia dan Market Leader Trade Finance (Asian Banks) in Indonesia

Finance Asia menganugerahkan 9 Award ke BRI. Beberapa diantaranya adalah Best Financial Company (Gold) Best Corporate ESG Strategy (Gold), Best Overall Company (Gold) dan termasuk Best CEO untuk Direktur Utama BRI.

The Asset Triple A menobatkan BRI sebagai Best Issuer for Sustainable Finance, Best Sustainability-Linked Loan, Best Private Bank for High Net Worth Individual in Indonesia.

Global Finance menobatkan BRI sebagai Best Bank in Indonesia. Brand Finance memberikan predikat kepada BRI sebagai "The Most Valuable Brand in Indonesia" (peringkat 1 di Indonesia).

Terkait pencapaian tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa kinerja cemerlang BRI Group nyatanya banyak mendapat apresiasi dan penghargaan dari berbagai pihak. Penilaian ini sekaligus menunjukkan keberanian BRI untuk dinilai dan di-assess berbagai pihak eksternal yang independen, bonafit dan kredibel.



KR-Istimewa

Selain berkinerja cemerlang pada 2023, BRI juga sekaligus berhasil meraih lebih 200 penghargaan, 53 diantaranya bertaraf internasional.

Sunarso menambahkan bahwa berbagai penghargaan tersebut didedikasikan kepada Insan BRILian yang telah memberikan kontribusi terbaiknya kepada BRI dan untuk Indonesia. Penghargaan ini juga dipersembahkan untuk seluruh nasabah UMKM BRI yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

"Berbagai penghargaan ini tentunya semakin memotivasi kita untuk tidak pernah berhenti menjadi dan memberi yang terbaik kepada BRI dan negeri ini," ungkapnya.

Keberhasilan BRI Group mendapatkan berbagai penghargaan tersebut tak terlepas dari kemampuannya menjaga kinerja positif secara berkelanjutan. Dimana hingga Kuartal III 2023 asset BRI secara konsolidasi meningkat 9,93% year on year (yoy) menjadi Rp 1.851,97 triliun.

Pertumbuhan aset tersebut juga diiringi dengan perolehan laba dalam 9 bulan yang mencapai sebesar Rp 44,21 triliun atau tumbuh 12,47% yoy. Sunarso mengungkapkan bahwa kontributor utama penopang kinerja positif BRI tersebut diantaranya adalah penyaluran kredit yang tumbuh double digit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan dana murah yang juga tumbuh double digit, kualitas kredit yang terjaga, serta proporsi fee-based income yang porsinya terus meningkat terhadap keseluruhan pendapatan BRI. (Sal)

**PENGUMUMAN**  
Seleksi Calon Direktur Operasional Dan Bisnis  
Perumda BPR Bank Jogja  
Masa Jabatan Tahun 2024-2029

**Persyaratan peserta:**

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berijazah minimal S1
3. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali
4. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun terkait bidang perbankan.
5. Untuk kelengkapan lain dapat dilihat

Kirimkan lamaran dilampiri dokumen pendukung kepada:  
Sekretariat Panitia Seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Jogja  
Alamat : Jl. Kenari Nomor 56 Yogyakarta, Kode Pos: 55165, Telp. (0274) 515865  
atau melalui email : perekonomiankerjasama@ogjakota.go.id

Yogyakarta, 18 Januari 2024  
Ketua Panitia Seleksi,  
Ir. Aman Yuridijaya, M.M.